

## ABSTRAK

### **Siti Mariah Yasmin; Respons Organisasi Persatuan Islam terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Tahun 1985**

Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dalam pidato Soekarno di depan sidang BPUPKI, Pancasila merupakan dasar Negara atau ideologi Negara, yang kemudian dijadikan sebagai doktrin ideologis untuk menggiring rakyat pada Demokrasi Terpimpin dan poros Nasakom. Namun setelah Pemerintah Soekarno runtuh dan digantikan oleh Pemerintah Soeharto Pancasila dijadikan sebagai mitos Asas Tunggal yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam partai dan organisasi kemasyarakatan, dengan mengeluarkan UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam kebijakan ini pemerintah Soeharto menghendaki semua organisasi kemasyarakatan mengganti asas organisasinya dengan Pancasila.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Persatuan Islam sejak awal berdirinya sampai awal Orde Baru; Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam; Untuk mengetahui respons organisasi Persatuan Islam terhadap pemberlakuan asas tunggal.

Metode yang digunakan adalah metode historis melalui empat tahapan, yaitu tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam penulisan skripsi ini semua tahapan penelitian dilakukan karena data yang digunakan terdapat sumber primer dan sumber sekunder karena banyak data yang merupakan buku-buku yang relatif baru, maka penulis juga melakukan studi pustaka.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa organisasi Persatuan Islam yang merupakan organisasi Islam yang berasaskan Islam yang senantiasa membela kepentingan umat Islam, harus mengganti asas organisasinya yang tadinya Islam menjadi Pancasila.

Setelah penulis menganalisis terhadap sumber data, dapat diambil kesimpulan bahwa UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan gagasan yang dicanangkan oleh Soeharto, tujuannya adalah untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas di Indonesia. Selain itu UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan depolitisasi terhadap umat Islam, karena pada saat itu suara umat Islam sangat berpengaruh. Kebijakan Soeharto yaitu UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan sangat merugikan umat Islam, namun di sini umat Islam tidak dapat berbuat apa-apa karena pemerintah mengancam akan membubarkan organisasi manapun yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Semua organisasi Islam termasuk Persatuan Islam terpaksa menerima UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan demi berjalannya roda organisasi, namun Persatuan Islam hanya mengganti asasnya saja tetapi tujuan organisasinya tetap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.